

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah : Legal Drafting
 Kode Mata Muliah : HES 5373
 Bobot SKS : 3 (Tiga)
 Dosen Pengampu :
 Capaian : Mahasiswa dapat memahami prosedur, tata cara, dan teknis penyusunan suatu Peraturan Perundang-undangan (*legal drafting*) dan mampu menganalisis secara kritis produk hukum baik yang bersumber atau disusun oleh eksekutif maupun legislatif
 Pembelajaran :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Minggu Ke-	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sebagai Kemampuan Akhir yang diharapkan)	Materi Pembelajaran	Kriteria dan Bentuk Penilaian (Indikator)	Metode Pembelajaran (Estimasi waktu)	Referensi	Bobot Penilaian
1	Kesepakatan kontrak belajar selama satu semester	Kontrak Perkuliahan dan Perkenalan	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa memahami tujuan perkuliahan - Mahasiswa menyepakati sistem penilaian - Mahasiswa memahami rincian materi perkuliahan selama satu semester 	Ceramah	Silabus/ Katalog	-
2	Mahasiswa dapat memahami Sejarah, Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia	1. Peraturan Perundang-undangan pada masa penjajahan (kolonialisme) 2. Peraturan Perundang-undangan pada masa kemerdekaan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan peraturan perundang-undangan pada masa penjajahan (kolonialisme). - Menjelaskan Peraturan Perundang-undangan pada masa kemerdekaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelajaran Interaktif - Diskusi. - Tanya jawab 	Asshiddiqie, Jimly. 2005. <i>Model-model pengujian konstitusional di Berbagai Negara</i> . Jakarta : Konstitusi Press. Fatmawati. 2005. <i>Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia</i> . Jakarta : Rajagrafindo Persada. Febrian, 2004. <i>Hierarki Aturan Hukum di Indonesia</i> . Disertasi. Surabaya : Program Studi Ilmu Hukum	

					<p>Pascasarjana Universitas Airlangga.</p> <p>Gumayra, Dhahi K. 2006. <i>Sikronisasi Peraturan Perundang-undangan Penguasaan Tanah dengan Politik Agraria menurut pasal 3 ayat (3) UUD 1945</i>. Usulan Penelitian untuk tesis. Palembang : Universitas Sriwijaya</p> <p>Siahaan, Maruarar. 2006. <i>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</i>. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</p> <p>Soeprpto, Maria Farida Indrati. 1998. <i>Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya</i>. Yogyakarta : Kanisius</p> <p>Zen, A. Patra M. & Daniel Hutagalung (editor). 2006. <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia</i>. Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) & Pusat Studi hukum dan Kebijakan (PSHK)</p>	
3-4	Mahasiswa memahami Bentuk dan jenis peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang dasar 2. Undang-undang/perpu 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah, dan 6. Peraturan Perundang-undangan Lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang Undang-undang dasar 2. Menjelaskan tentang Undang-undang/perpu 3. Menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah 4. Menjelaskan tentang Peraturan Presiden 5. Menjelaskan tentang Peraturan Daerah, dan 6. Menjelaskan tentang Peraturan Perundang-undangan Lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelajaran Interaktif - Diskusi. - Tanya jawab 	<p>Asshiddiqie, Jimly. 2005. <i>Model-model pengujian konstitusional di Berbagai Negara</i>. Jakarta : Konstitusi Press.</p> <p>Fatmawati. 2005. <i>Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia</i>. Jakarta : Rajagrafindo Persada.</p> <p>Febrian, 2004. <i>Hierarki Aturan Hukum di Indonesia</i>. Disertasi. Surabaya : Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga.</p>	

					<p>Gumayra, Dhabi K. 2006. <i>Sikronisasi Peraturan Perundang-undangan Penguasaan Tanah dengan Politik Agraria menurut pasal 3 ayat (3) UUD 1945</i>. Usulan Penelitian untuk tesis. Palembang : Universitas Sriwijaya</p> <p>Siahaan, Maruarar. 2006. <i>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</i>. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</p> <p>Soeprpto, Maria Farida Indrati. 1998. <i>Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya</i>. Yogyakarta : Kanisius</p> <p>Zen, A. Patra M. & Daniel Hutagalung (editor). 2006. <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia</i>. Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLKHI) & Pusat Studi hukum dan Kebijakan (PSHK)</p>
5-6	Memahami tentang badan-badan pembentuk Peraturan Perundang-Undangan	<p>1. Kewenangan membentuk Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>2. Badan-Badan pembentuk dalam Peraturan perundang-Undangan</p>	<p>- Menjelaskan Tentang Kewenangan membentuk Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan.</p> <p>- Menjelaskan Tentang Badan-Badan pembentuk dalam Peraturan perundang-Undangan</p>	<p>- Pembelajaran Interaktif</p> <p>- Diskusi.</p> <p>- Tanya jawab</p>	<p>Asshiddiqie, Jimly. 2005. <i>Model-model pengujian konstitusional di Berbagai Negara</i>. Jakarta : Konstitusi Press.</p> <p>Fatmawati. 2005. <i>Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia</i>. Jakarta : Rajagrafindo Persada.</p> <p>Febrian, 2004. <i>Hierarki Aturan Hukum di Indonesia</i>. Disertasi. Surabaya : Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga.</p> <p>Gumayra, Dhabi K. 2006. <i>Sikronisasi Peraturan Perundang-undangan</i></p>

					<p><i>Penguasaan Tanah dengan Politik Agraria menurut pasal 3 ayat (3) UUD 1945.</i> Usulan Penelitian untuk tesis. Palembang : Universitas Sriwijaya</p> <p>Siahaan, Maruarar. 2006. <i>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.</i> Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</p> <p>Soeprpto, Maria Farida Indrati. 1998. <i>Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya.</i> Yogyakarta : Kanisius</p> <p>Zen, A. Patra M. & Daniel Hutagalung (editor). 2006. <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia.</i> Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLKHI) & Pusat Studi hukum dan Kebijakan (PSHK)</p>	
7	Memahami Tentang dasar hukum pembentukan peraturan Perundang-Undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. landasan konstitusional 2. UU No. 10 Tahun 2004. 3. Tatib DPR RI 4. Perpres No. 68 Tahun 2005. 5. Tatib DPRD 6. Kepmendagri No. 21 Tahun 2001 7. Kepmendagri No. 23 Tahun 2001. 8. Kepmendagri No. 48 Tahun 2002. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang landasan konstitusional. 2. Menjelaskan tentang UU No. 10 Tahun 2004. 3. Menjelaskan tentang Tatib DPR RI 4. Menjelaskan tentang Perpres No. 68 Tahun 2005. 5. Menjelaskan tentang Tatib DPRD. 6. Menjelaskan tentang Kepmendagri No. 21 Tahun 2001 7. Menjelaskan tentang Kepmendagri No. 23 Tahun 2001. 8. Menjelaskan tentang 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelajaran Interaktif - Diskusi. - Tanya jawab 	<p>Asshiddiqie, Jimly. 2005. <i>Model-model pengujian konstitusional di Berbagai Negara.</i> Jakarta : Konstitusi Press.</p> <p>Fatmawati. 2005. <i>Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia.</i> Jakarta : Rajagrafindo Persada.</p> <p>Febrian, 2004. <i>Hierarki Aturan Hukum di Indonesia.</i> Disertasi. Surabaya : Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga.</p> <p>Gumayra, Dhabi K. 2006. <i>Sikronisasi Peraturan Perundang-undangan Penguasaan Tanah dengan Politik Agraria menurut pasal 3 ayat (3)</i></p>	

			Kepmendagri No. 48 Tahun 2002.		<p>UUD 1945. Usulan Penelitian untuk tesis. Palembang : Universitas Sriwijaya</p> <p>Siahaan, Maruarar. 2006. <i>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</i>. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</p> <p>Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. <i>Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya</i>. Yogyakarta : Kanisius</p> <p>Zen, A. Patra M. & Daniel Hutagalung (editor). 2006. <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia</i>. Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLKHI) & Pusat Studi hukum dan Kebijakan (PSHK)</p>	
8	Ujian Tengah Semester (UTS)			- Test Lisan/ Tertulis		30 %
9	Memahami materi muatan dalam Peraturan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> materi muatan Peraturan Perundang-Undangan. muatan Undang-Undang Dasar. materi muatan Undang-Undang/Perpu. Materi muatan Peraturan pemerintah. Materi muatan Peraturan Presiden. Muatan Peraturan Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan tentang pengertian materi muatan Peraturan Perundang-Undangan. Menjelaskan tentang materi muatan Undang-Undang Dasar. Menjelaskan tentang materi muatan Undang-Undang/Perpu. Menjelaskan tentang Materi muatan Peraturan pemerintah. Menjelaskan tentang Materi muatan Peraturan Presiden. Menjelaskan tentang Materi Muatan Peraturan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembelajaran Interaktif Diskusi. Tanya jawab 	<p>Asshiddiqie, Jimly. 2005. <i>Model-model pengujian konstitusional di Berbagai Negara</i>. Jakarta : Konstitusi Press.</p> <p>Fatmawati. 2005. <i>Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia</i>. Jakarta : Rajagrafindo Persada.</p> <p>Febrian, 2004. <i>Hierarki Aturan Hukum di Indonesia</i>. Disertasi. Surabaya : Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga.</p> <p>Gumayra, Dhabi K. 2006. <i>Sikronisasi Peraturan Perundang-undangan Penguasaan Tanah dengan Politik</i></p>	

					<p><i>Agraria menurut pasal 3 ayat (3) UUD 1945. Usulan Penelitian untuk tesis. Palembang : Universitas Sriwijaya</i></p> <p>Siahaan, Maruarar. 2006. <i>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</i>. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</p> <p>Soeprpto, Maria Farida Indrati. 1998. <i>Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya</i>. Yogyakarta : Kanisius</p> <p>Zen, A. Patra M. & Daniel Hutagalung (editor). 2006. <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia</i>. Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) & Pusat Studi hukum dan Kebijakan (PSHK)</p>
10	Memahami tentang perencanaan penyusunan Peraturan perundang-Undangan	<p>1. Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS).</p> <p>2. program Legislasi Daerah (PROLEGDA).</p>	<p>1. Menjelaskan tentang program Legislasi Nasional (PROLEGNAS).</p> <p>2. Menjelaskan tentang program Legislasi Daerah (PROLEGDA).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelajaran Interaktif - Diskusi. - Tanya jawab 	<p>Asshiddiqie, Jimly. 2005. <i>Model-model pengujian konstitusional di Berbagai Negara</i>. Jakarta : Konstitusi Press.</p> <p>Fatmawati. 2005. <i>Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia</i>. Jakarta : Rajagrafindo Persada.</p> <p>Febrian, 2004. <i>Hierarki Aturan Hukum di Indonesia</i>. Disertasi. Surabaya : Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga.</p> <p>Gumayra, Dhabi K. 2006. <i>Sikronisasi Peraturan Perundang-undangan Penguasaan Tanah dengan Politik Agraria menurut pasal 3 ayat (3) UUD 1945. Usulan Penelitian</i></p>

					<p>untuk tesis. Palembang : Universitas Sriwijaya</p> <p>Siahaan, Maruarar. 2006. <i>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</i>. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</p> <p>Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. <i>Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya</i>. Yogyakarta : Kanisius</p> <p>Zen, A. Patra M. & Daniel Hutagalung (editor). 2006. <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia</i>. Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) & Pusat Studi hukum dan Kebijakan (PSHK)</p>
11-12	Memahami tentang tahapan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1.tahap persiapan dan perencanaan. 2.tahap pembahasan dan pengesahan RUU. 3.tahap pembahasan dan pembicaraan di DPR. 4.tahap penetapan atau pengesahan. 5.tahap pengundangan atau pengumuman. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang tahap persiapan dan perencanaan. 2.Menjelaskan tentang tahap pembahasan dan pengesahan RUU. 3.Menjelaskan tentang tahap pembahasan dan pembicaraan di DPR. 4.Menjelaskan tentang tahap penetapan atau pengesahan. 5.Menjelaskan tentang tahap pengundangan atau pengumuman. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelajaran Interaktif - Diskusi. - Tanya jawab 	<p>Asshiddiqie, Jimly. 2005. <i>Model-model pengujian konstitusional di Berbagai Negara</i>. Jakarta : Konstitusi Press.</p> <p>Fatmawati. 2005. <i>Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia</i>. Jakarta : Rajagrafindo Persada.</p> <p>Febrian, 2004. <i>Hierarki Aturan Hukum di Indonesia</i>. Disertasi. Surabaya : Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga.</p> <p>Gumayra, Dhab K. 2006. <i>Sikronisasi Peraturan Perundang-undangan Penguasaan Tanah dengan Politik Agraria menurut pasal 3 ayat (3) UUD 1945</i>. Usulan Penelitian untuk tesis. Palembang : Universitas Sriwijaya</p>

					<p>Siahaan, Maruarar. 2006. <i>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</i>. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</p> <p>Soeprpto, Maria Farida Indrati. 1998. <i>Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya</i>. Yogyakarta : Kanisius</p> <p>Zen, A. Patra M. & Daniel Hutagalung (editor). 2006. <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia</i>. Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLKHI) & Pusat Studi hukum dan Kebijakan (PSHK)</p>
14	Mamahami Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyusunan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik perumusan judul. 2. pembukaan. 3. batang tubuh Undang-Undang. 4. penutup. 5. penjelasan dan lampiran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Tentang teknik perumusan judul. 2. Menjelaskan tentang pembukaan. 3. Menjelaskan tentang batang tubuh Undang-Undang. 4. Menjelaskan tentang penutup. 5. Menjelaskan tentang penjelasan dan lampiran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelajaran Interaktif - Diskusi. - Tanya jawab 	<p>Asshiddiqie, Jimly. 2005. <i>Model-model pengujian konstitusional di Berbagai Negara</i>. Jakarta : Konstitusi Press.</p> <p>Fatmawati. 2005. <i>Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia</i>. Jakarta : Rajagrafindo Persada.</p> <p>Febrian, 2004. <i>Hierarki Aturan Hukum di Indonesia</i>. Disertasi. Surabaya : Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga.</p> <p>Gumayra, Dhabi K. 2006. <i>Sikronisasi Peraturan Perundang-undangan Penguasaan Tanah dengan Politik Agraria menurut pasal 3 ayat (3) UUD 1945</i>. Usulan Penelitian untuk tesis. Palembang : Universitas Sriwijaya</p> <p>Siahaan, Maruarar. 2006. <i>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik</i></p>

					<p>Indonesia. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</p> <p>Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. <i>Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya</i>. Yogyakarta : Kanisius</p> <p>Zen, A. Patra M. & Daniel Hutagalung (editor). 2006. <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia</i>. Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLKHI) & Pusat Studi hukum dan Kebijakan (PSHK)</p>	
15	Memahami tentang tata cara pengujian Peraturan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. hak menguji. 2. sejarah hak menguji di Indonesia. 3. tata cara menguji peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang 4. tata cara menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang pengertian hak menguji. 2. Menjelaskan tentang sejarah hak menguji di Indonesia. 3. Menjelaskan tentang tata cara menguji peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. 4. Menjelaskan tentang tata cara menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelajaran Interaktif - Diskusi. - Tanya jawab 	<p>Asshiddiqie, Jimly. 2005. <i>Model-model pengujian konstitusional di Berbagai Negara</i>. Jakarta : Konstitusi Press.</p> <p>Fatmawati. 2005. <i>Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia</i>. Jakarta : Rajagrafindo Persada.</p> <p>Febrian, 2004. <i>Hierarki Aturan Hukum di Indonesia</i>. Disertasi. Surabaya : Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga.</p> <p>Gumayra, Dhabi K. 2006. <i>Sikronisasi Peraturan Perundang-undangan Penguasaan Tanah dengan Politik Agraria menurut pasal 3 ayat (3) UUD 1945</i>. Usulan Penelitian untuk tesis. Palembang : Universitas Sriwijaya</p> <p>Siahaan, Maruarar. 2006. <i>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</i>. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</p>	

					Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. <i>Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya</i> . Yogyakarta : Kanisius Zen, A. Patra M. & Daniel Hutagalung (editor). 2006. <i>Panduan Bantuan Hukum di Indonesia</i> . Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLKHI) & Pusat Studi hukum dan Kebijakan (PSHK)	
16	Ujian Akhir Semester (UAS)			- Test Lisan/ Tertulis		40 %

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :
Dosen Pengampu	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan